Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, dan Masyarakat
e-ISSN: 2829-6958 * https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/
Volume 6 Nomor 2, November 2023

Kritik terhadap Penerapan Demokrasi dari Masa Reformasi hingga Era Digital di Indonesia

John Abraham Ziswan Suryosumunar [1]
Fuad Noorzeha [2]
Program Doktor Filsafat Universitas Gadjah Mada[1, 2]
suryosumunar0202@gmail.com [1]

Keywords:
democracy, reformation, digital social media, Indonesia

Abstract

Democracy is often interpreted as a system of government based on the sovereignty of the people. Democracy is considered an ideal system to be implemented in various countries, including Indonesia. However, in reality, the implementation of democracy in Indonesia still results in various forms of discrimination, centralisation of power, and injustice. The researcher seeks to understand the dynamics of the application and understanding of democracy in Indonesia by using the hermeneutic method, through tracing the historical continuity that occurred. The study conducted resulted in the understanding that: (1) Democracy in Indonesia has experienced its ups and downs from the independence period to the reformation period with various forms of implementation. The reformation period became one of the gates as well as a bridge from the transfer of centralised power to civilian-held decentralisation. (2) The multi-party system is one of the results of the decentralisation of power during the reformation period. The implementation of the multi-party system encourages multi-dynasty politics, due to political personalisation and patronage culture within each party. (3) The development of digital social media encourages the manipulation of signs that are the result of reality reduction. A democratic image is built through digital social media as a representation of siding with the people by the elites. However, the democratic image built through digital social media is in line with the monopoly of the concept of democracy in favour of certain groups, which is then a driving factor in the occurrence of social polarisation in every political contestation.

Kata kunci:
demokrasi, reformasi, media sosial digital,

Abstrak

Demokrasi sering kali dimaknai sebagai suatu sistem pemerintahan yang berlandas pada kedaulatan rakyat. Demokrasi dianggap merupakan sistem ideal untuk diterapkan pada berbagai negara, termasuk di Indonesia. Tetapi pada realitanya penerapan demokrasi di Indonesia juga tetap menghasilkan berbagai bentuk diskriminasi, sentralisasi kekuasaan, dan ketidakadilan. Peneliti berupaya

memahami dinamika penerapan dan pemahaman demokrasi di Indonesia dengan menggunakan metode hermeneutika, melalui penelusuran terhadap kesinambungan historis yang terjadi. Kajian yang dilakukan menghasilkan pemahaman bahwa: (1) Demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surutnya dari masa kemerdekaan sampai dengan masa reformasi dengan beragam bentuk penerapannya. Masa reformasi menjadi salah satu gerbang sekaligus jembatan dari pengalihan kekuasaan yang bersifat sentralistik ke arah desentralisasi yang dipegang sipil. (2) Sistem multi-partai adalah salah satu hasil penerapan desentralisasi kekuasaan di masa reformasi. Penerapan sistem multi-partai mendorong terjadinya multi-dinasti politik, akibat personalisasi politik dan kultur patronase dalam setiap tubuh partai. (3) Perkembangan media sosial digital mendorong manipulasi tanda yang menjadi hasil reduksi realitas. Citra demokratis dibangun melalui media sosial digital sebagai representasi keberpihakan kepada rakyat oleh para elite. Tetapi citra demokratis yang dibangun melalui media sosial digital ini sejalan dengan monopoli konsep demokrasi yang berpihak kepada golongan tertentu, hal ini lah yang kemudian menjadi faktor pendorong dari terjadinya polarisasi sosial pada setiap kontestasi politik

Pendahuluan

Demokrasi tentunya merupakan suatu istilah yang cukup akrab didengar di telinga masyarakat Indonesia. Tak jarang istilah ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari dari masyarakat untuk mengungkapkan suatu kondisi berkeadilan yang mengutamakan kepentingan bersama atau menjadi ungkapan kontras dari keadaan sentralistik yang tak transparan. Hal tersebut dapat dilihat misalkan saat masyarakat ingin menentukan suatu keputusan dalam lingkup keluarga sebagai komunitas terkecil hingga di lingkup kelembagaan tertentu. Bahkan ungkapan demokrasi ini di berbagai media digunakan oleh para elite sebagai *lip service* secara persuasif untuk menarik perhatian positif dari masyarakat Indonesia (Suryosumunar, 2022). Tak jarang juga ungkapan demokrasi digunakan dalam berbagai tuntutan dan kritik masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Tetapi entah sejak kapan, tak dapat dipungkiri bahwa sudah sangat lama ungkapan demokrasi ini diposisikan dalam benak masyarakat Indonesia sebagai suatu istilah yang bernada positif.

Pada dunia politik, demokrasi sering kali dikatakan sebagai prinsip ideal, sebagai satu-satunya aturan main yang berlaku (Davidson, 2022: 7). Suatu prinsip yang berusaha dipertahankan atau mungkin diperjuangkan dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat. Mengingat bahwa demokrasi merujuk pada suatu paradigma yang memposisikan rakyat sebagai kekuatan politik utama. Demokrasi yang berasal dari

istilah *demos* (rakyat) dan *kratos* (kekuasaan), merupakan istilah yang dimunculkan di era Yunani Klasik sebagai representasi dari pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat, atau kedaulatan rakyat (Borrong, 2004: 4). Meski sering kali diposisikan sebagai prinsip ideal dalam dunia politik yang mampu menjunjung kekuatan rakyat di atas segalanya, tetapi demokrasi tetap lah memiliki celah dan kelemahan. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Apter (1963) bahwa bagaimana pun juga penerapan demokrasi tidak lah terlepas dari campur tangan manusia, yang tentunya juga mencerminkan keterbatasan dalam hal objektivitas di luar diri manusia. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Davidson (2022: 77) terdapat kesulitan tersendiri untuk memaknai demokrasi secara tepat, terdapat unsur-unsur kontraditif di dalamnya yang membawa makna yang berbeda dari para akademisi. Bahkan hingga kini dapat dilihat bahwa sangat sulit untuk menentukan contoh negara yang menerapakan demokrasi secara sempurna. Dalam hal ini lah, demokrasi kemudian juga memicu perdebatan tersendiri dalam sejarah peradaban manusia hingga saat ini.

Paradigma demokrasi di Indonesia dapat dikatakan tidak terlepas dari dinamika politik yang terjadi sejak masa kemerdekaan dan semakin menggebu pasca reformasi setelah lengsernya pemerintahan otoriter Orde Baru. Semangat kebebasan dan kesetaraan dari demokrasi adalah suatu hal yang terus didengungkan di tiap ruang-ruang publik dalam pencarian keadilan untuk masyarakat. Bahkan hal tersebut muncul semakin massif dengan disokong keberadaan media sosial digital. Media sosial digital membuka celah untuk masyarakat seluas-luasnya bersuara dan berpendapat. Tetapi hal ini tidak lah selamanya membawa kepada dampak positif. Demokrasi, dengan didukung kekuatan media sosial, ternyata juga membawa pihak yang memiliki kapital dan pengaruh (elite) untuk dapat berada pada posisi yang lebih tinggi, bahkan di atas rakyat sekalipun (Harahap, 2020). Dalam hal ini lah demokrasi tidak lah bersifat setara, *democracy is inequality*. Kontradiksi antara penerapan demokrasi dengan idealitas yang digaungkan terhadap prinsip demokrasi ini memperlihatkan bahwa demokrasi harus dipahami sebagai proses yang tetap perlu diperdebatkan, khususnya di tengah hegemoni media sosial saat ini.

Penggiringan opini masyarakat dengan media sosial juga menegaskan kemunculan polarisasi sosial yang tajam. Media sosial nyatanya memiliki kemampuan hegemonik dalam mengarahkan opini masyarakat untuk mendukung atau pun menjatuhkan golongan dan pribadi tertentu. Hal ini nampak secara khusus pada setiap kontestasi politik yang terjadi di Indonesia. Polarisasi politik yang tak jarang membawa

kepada konflik sosial, kebencian, dan bahkan intimidasi sosial merupakan efek negatif dari demokratisasi di tengah hegemoni media sosial tersebut. Dalam kondisi ini lah demokrasi tak selalu menampakan keadilan, pihak dengan penguasaan kapital tertentu akan lebih mudah memanfaatkan media sosial untuk memanipulasi kesadaran masyarakat. Realita yang telah dipaparkan terebut menjadi dasar untuk penulis berupaya meninjau kembali paradigma demokrasi di Indonesia pasca reformasi dan hegemoni media sosial digital. Hal tersebut dilakukan sebagai suatu kajian filosofis menggunakan metode hermeneutika (Bakker, 2007) dengan menelusur kesinambungan historis penerapan dan pemahaman hermeneutika dari masa reformasi hingga era digital di Indonesia, melihat berbagai tantangan demokrasi di tengah hegemoni media sosial digital, dan meninjau kembali paradigma demokrasi Indonesia dengan menakar keberhasilan dan kegagalannya menjaga kebebasan dan kesetaraan masyarakat. Kajian ini diupayakan untuk dapat menjadi salah satu alternatif sudut pandang dalam melihat demokrasi secara lebih objektif, tanpa terjebak pada idealitas dan dogmatisasi demokrasi yang telah menutup ruang perdebatan teoritik terhadapnya.

Metode

Artikel ini berbasis pada penelitian kualitatif dalam bidang filsafat politik dengan menggunakan data kepustakaan sebagai sumber data utama. Pelaksanaan pengumpulan data kepustakaan dilakukan dengan merujuk pada objek kajian dari penelitian ini yang berupa objek material yaitu penerapan demokrasi di Indonesia dari masa reformasi hingga era digital di Indonesi, serta objek formalnya yang merupakan pemikiran-pemikiran yang memiliki korelasi dengan kritik terhadap penerapan demokrasi dalam kajian filsafat politik. Sebagai penelitian bidang filsafat politik dengan menggunakan objek formal dan objek material tersebut, tahap analisis pada penelitian ini menggunakan metode analisis berupa metode hermeneutika filosofis, dengan salah satu unsur metodisnya yaitu kesinambungan hidtoris (Bakker, 2007). Metode diterapkan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk menangkap substansi dari penerapan prinisp demokrasi pada setiap periode kepemimpinan politik di Indonesia dari sebelum masa reformasi hingga era digital saat ini.

Hasil dan Pembahasan

1 Reformasi sebagai Gerbang Demokrasi

Pasca runtuhnya kepemimpinan Rezim Orde baru dengan ditandai pidato pengunduran diri Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, dapat dikatakan menjadi titik tolak dimulainya babak baru dari sejarah kebangsaan Indonesia. Rezim yang telah bercokol salama 32 tahun tersebut, sering dikatakan sebagai rezim otoriter yang membangun kekuasaannya secara sentralistik. Setelah berkuasa sejak 1966 dengan memanfaatkan Surat Perintah 11 Maret (yang hingga kini keabsahannya masih menjadi perdebatan), Soeharto membangun pemerintahannya dengan bertumpu pada kekuatan militer, khususnya dalam mempertahankan legitimasi kekuasaannya. Tidak jarang kekuatan militer digunakan rezim Orde Baru sebagai alat represi dalam menundukan masyarakat dengan dalih stabilitas nasional dan mempertahankan ideologi bangsa. Pada catatan sejarah Indonesia, tidak dapat dielakan kepemimpinan Soeharto telah banyak menghasilkan berbagai bentuk pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) karena berbagai kebijakan represifnya, mulai dari peristiwa Tanjung Priok, Timor Timur, Talangsari hingga penculikan para aktivis dan pembredelan media pengkritik pemerintah (Gultom, 2013: 68). Dengan tangan besinya, Soeharto menempatkan dirinya sebagai pucak piramida kepemimpinan (*primus inter pares*) yang berupaya mempertahankan legitimasi kekuasaannya baik melalui represi militer maupun hegemoni politik.

Kepemimpinan rezim Orde Baru, meskipun dikatakan sebagai pemerintahan otoriter, namun rezim ini juga telah melahirkan konsep demokrasi Pancasila yang telah diterapkan selama kekuasaannya. Demokrasi Pancasila di masa Orde Baru diusung untuk mengoreksi dan mengganti demokrasi terpimpin yang diterapkan di masa kepemimpinan Presiden Soekarno, Orde Lama, dari tahun 1959 hingga 1965. Demokrasi terpimpin dianggap sentralistik karena terpusat pada presiden dan tidak sesuai dengan Pancasila serta UUD 1945. Tetapi dalam penerapnnya, demokrasi Pancasila di era kekuasaan Orde Baru juga tidak jauh berbeda dengan konsep demokrasi sebelumnya. Demokrasi Pancasila di masa Orde Baru nyatanya semata digunakan untuk

mempertahankan legitimasi kekuasaan (Hutabarat, dkk, 2021). Pancasila didengungkan sebagai asas tunggal perpolitikan Indonesia. Pada masa tersebut demokrasi Pancasila digunakan sebagai alat politik untuk memberhanguskan lawan politik dengan melebelinya sebagai anti Pancasila. Kondisi ini lah yang kemudian memposisikan demokrasi menjadi suatu hal yang semu dan lembaga negara hanya diposisikan sebagai alat kekuasaan pemerintah.

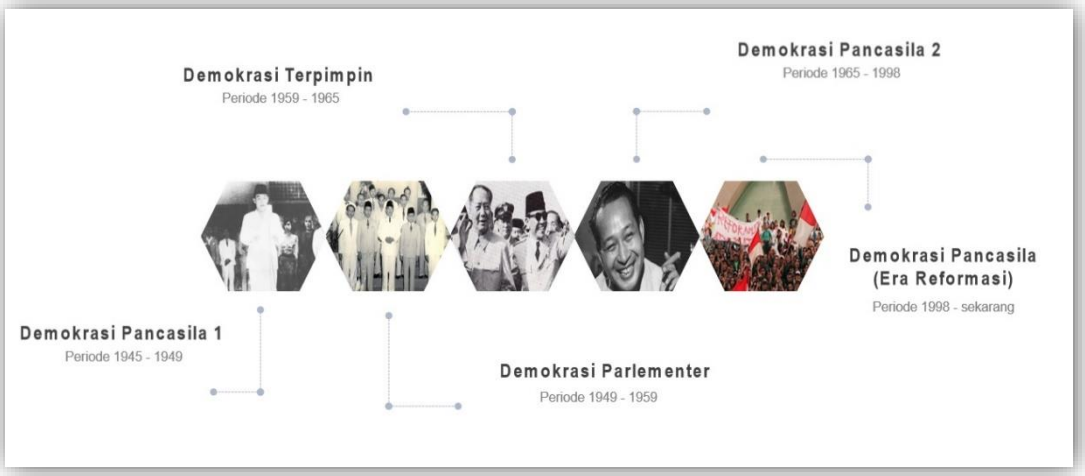

Gambar 1.

Periodesasi Penerapan Sistem Demokrasi di Indonesia

(Sumber: Webinar Nasional dengan tema "Meninjau Demokrasi di Indonesia dalam Hegemoni Media Sosial" di Universitas PGRI Semarang)

Kekuatan politik Orde Baru telah berhasil mengatasi berbagai tantangan dan ancaman terhadap kedudukannya. Tidak hanya melalui kekuatan militernya, Soeharto juga berhasil menguasai tiap lembaga pemerintahan dengan menempatkan aktor-aktor pendukungnya dari Partai Golongan Karya dan militer pada posisi strategis baik di lingkup eksekutif, legislatif, maupun yudikatif (Noventari, 2016: 37). Tetapi nyatanya tak ada yang abadi, runtunya perekonomian akibat krisis ekonomi global, perpecahan di kalangan elite, polaritas militer, demontrasi mahasiswa dan kerusuhan di wilayah perkotaan di Indonesia, menjadi faktor yang kemudian memaksa rezim Orde Baru bertekut lutut (Davidson, 2022: 2).

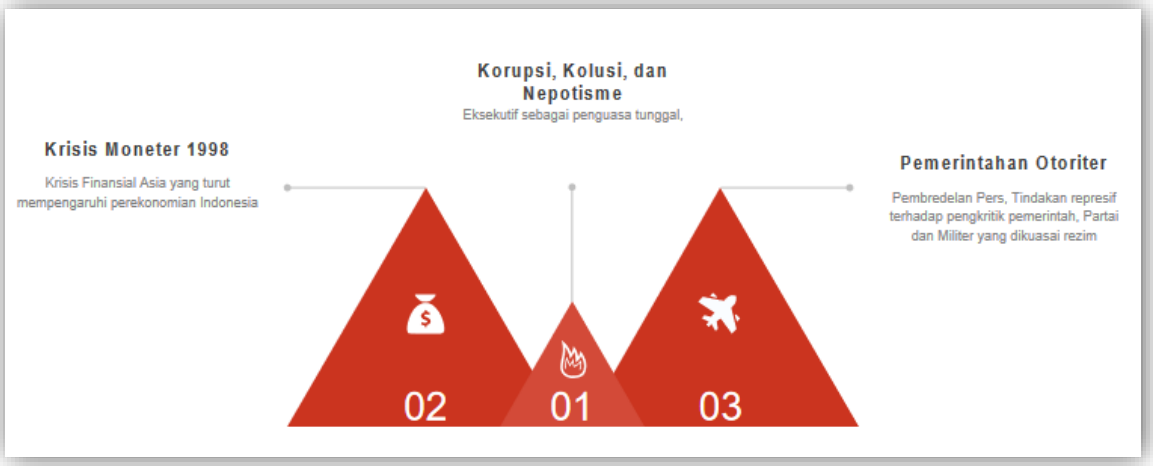

Gambar 2.

Tiga Sebab Runtuhnya Pemerintahan Orde Baru

(Sumber: Webinar Nasional dengan tema "Meninjau Demokrasi di Indonesia dalam Hegemoni Media Sosial" di Universitas PGRI Semarang)

Meski kondisi ini adalah pintu gerbang baru untuk bangsa Indonesia menghirup segarnya kebebasan dari cengkraman kekusaan otoriter, namun terbukanya gerbang tersebut tidak lantas mengantarkan bangsa Indonesia pada jalan yang mulus. Suatu kondisi peralihan di waktu itu yang kemudian sering disebut sebagai era reformasi, peralihan kekuasaan dari kekuatan militer kepada sipil, juga membawa suatu bentuk disorientasi kebangsaan. Kondisi disorientasi ini nampak dengan terjadinya berbagai konflik sosial, yang tidak jarang membawa isu etnisitas dan keagamaan di berbagai wilayah di Indonesia.

Berbagai konflik sosial setelah tahun 1998 atau pasca runtuhnya Orde Baru sering dikatakan merupakan bentuk transisi sosial pasca otoritarianisme yang sentralistik ke arah demokrasi. Namun, berdasar data Lingkaran Survey Indonesia (detik.com, 2012), terdapat lebih dari 10.000 korban tewas dan lebih dari 100 ribu korban harus berpindah untuk mengungsi dari wilayah konflik dalam berbagai kerusuhan yang terjadi setelah lengsernya Soeharto pada tahun

1998. Tentunya hal ini merupakan sejarah kelam era reformasi yang tidak bisa begitu saja dianggap sepele. Berbagai konflik sosial seperti yang terjadi di Sampit, Maluku, Maluku Utara, Mataram, dan Papua memperlihatkan suatu kondisi dimana runtuhnya Orde Baru dengan kepemimpinannya yang sentralistik, mendorong munculnya pemahaman yang anti terhadap sentralisasi politik dengan berorientasi pada golongan atau kelompok etnisitas maupun keagamaan pada berbagai wilayah di Indonesia.

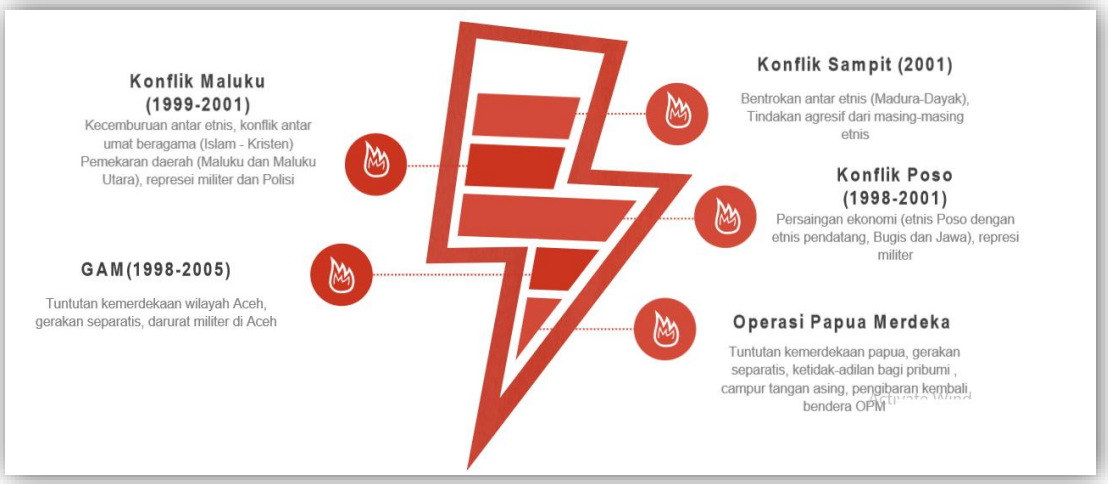

Gambar 3.

Beragam Konflik Etnis dan Agama Pasca Reformasi di Indonesia

(Sumber: Webinar Nasional dengan tema "Meninjau Demokrasi di Indonesia dalam Hegemoni Media Sosial" di Universitas PGRI Semarang)

Kondisi tersebut mempertegas terjadinya suatu bentuk disintegrasi sosial dan disorientasi kebangsaan. Bahkan tepat empat tahun keruntuhan Orde Baru, provinsi Timor Timur akhirnya melepaskan diri dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Negara Timor Leste. Menurut Indrawan (2015), peristiwa pemisahan Timor Timur dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasar hasil pemungutan suara oleh masyarakat Timor Timur pada tahun 1999, memperlihatkan lemahnya ketahanan nasional Indonesia yang menjadi ancaman bagi kesatuan dan persatuan Indoensia kedepan. Dapat dikatakan bahwa berbagai konflik sosial yang terjadi pasca 1998 merupakan

deretan panjang dari gejolak sosial-politik di era reformasi yang digadang sebagai pintu gerbang menuju demokrasi.

2. Kedudukan Partai dalam Proses Demokrasi di Indonesia

Gejolak sosial-politik pasca reformasi yang terjadi di Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh polarisasi sosial akibat perbedaan prefrensi politik. Partai politik yang diposisikan sebagai penghubung antara suara rakyat kepada pemerintahan, memiliki andil besar dalam menerapkan prinsip demokrasi untuk menghimpun suara rakyat berdasar dukungan pada preferensi politik tertentu. Pentingnya kedudukan partai politik dalam memperkuat dukungan terhadap suatu kekuatan politik melalui himpunan suara rakyat ini lah yang kemudian sering kali diboncengi kepentingan golongan maupun individu. Bahkan partai di masa Orde Baru dapat dikatakan hanya lah sebagai alat memperkuat legitimasi kekuasaan dengan sokongan suara rakyat yang bersifat semu. Mengingat Golongan Karya (GOLKAR), yang di masa tersebut menjadi partai pemerintah, mendapatkan berbagai dukungan militer dan birokrasi untuk mengalahkan partai kompetitornya demi mempertahankan kekuasaan Soeharto. Hal tersebut nampak dari kemenangan Golongan Karya dari enam kali pemilu yang dilaksanakan di era Orde Baru, sedangkan partai politik, baik PDI dan PPP, hanya lah menjadi aksesoris demokrasi (Labolo & Ilham, 2015: 104). Meski polarisasi politik di era Orde Baru dapat dikatakan cukup rendah, namun berbagai kecurangan yang didukung oleh kekuatan otoriter penguasa sangat lah besar dalam mempengaruhi proses pemilu di masa tersebut.

Pemilu dapat dikatakan sebagai kunci utama dalam pelaksanaan prinsip demokrasi pada penentuan keputusan politik dalam suatu negara. Partai dalam hal ini memiliki peran yang sangat penting, karena diposisikan sebagai jembatan untuk rakyat menuju kedudukan tertentu dalam pemerintahan. Dengan mekanisme yang ada pada setiap partai, seluruh masyarakat semestinya berhak untuk ikut serta secara langsung dalam perpolitikan negara baik di ranah legislatif maupun eksekutif berdasar pada aturan konstituisional yang ada. Pasca

reformasi, partai politik bermunculan secara subur. Hal tersebut didasari kebijakan *interregnum* dari pemerintahan B.J Habibie yang membuka penerapan kembali sistem multipartai di Indonesia dengan berdasar pada UU Nomor 31 tahun 2002 (Liling, 2021). Semangat kesetaraan dan kebebasan untuk dapat berpendapat dan berserikat di masa reformasi tersebut mendorong *euphoria* politik dari masyarakat untuk berbondong-bondong masuk sebagai anggota partai atau pun membangun partai tersendiri berdasar pada asas demokrasi dan semangat masing-masing kelompok masyarakat.

Perkembangan demokrasi dengan penerapan sistem multi-partai di Indonesia diharapkan mampu untuk memberi ruang setiap masyarakat berkontribusi dalam tiap gerak perpolitikan nasional. Meski demikian, tetap terdapat celah kontradiksi di tengah kebebasan berpolitik yang dibangun pasca reformasi, dimana semangat kebebasan tersebut tidak sejalan dengan bagaimana relasi kuasa yang terbangun di dalam internal partai. Menurut Blondel dan Thiebaut (2010) hal tersebut dilandasi kuatnya kultur patronase di dalam tubuh partai. Patron dalam hal ini dapat diasosiasikan kepada para pimpinan partai atau tokoh yang diagungkan oleh masing-masing internal partai. Loyalitas yang berlebihan kepada tokoh tersebut yang mengakibatkan munculnya personalisasi politik, dalam hal ini arah dan gerak dari partai seakan terjerat oleh kepentingan dan keputusan dari tokoh tersebut. Kemudian kepentingan personal tersebut mempengaruhi penentuan ideologi dan mekanisme masing-masing partai yang secara sah diatur dalam internal partai. Dengan kata lain, reformasi politik senyatanya sampai saat ini masih belum secara maksimal membebaskan Indonesia dari sentralisasi politik. Bahkan dengan berdasar sistem *electoral threshold*, dapat dikatakan demokrasi Indonesia hanya menjadi sarana perebutan kekuasaan partai-partai besar saja, yang tidak lain menjadi alat untuk memenuhi kepentingan dan melegitimasi kekuasaan para patron dari setiap partai tersebut.

Partai politik idealnya membuka peluang untuk demokrasi dapat dilaksanakan dalam perpolitikan suatu negara, dalam arti bahwa keberadaan demokrasi pada suatu negara tidak dapat dipisahkan dari keberadaan partai (Cross & Katz, 2013). Meski demikian, tidak lantas pelaksanaan demokrasi akan

selalu berjalan secara efektif dengan dipengaruhi keberadaan partai politik. Kultur patronase yang membawa personalisasi politik pada tubuh partai secara tak terbantahkan juga membawa kemandekan dalam penerapan politik nasional, penolakan terhadap perubahan, ketidak adilan, serta sentralisasi politik yang pada dasarnya tidak sesuai dengan semangat demokrasi itu sendiri. Dalam kondisi tersebut siapa pun yang mendekat pada patron, sebagai pusat, akan memiliki posisi strategis dan memperoleh keleluasaan dalam menjalankan karir politiknya. Mekanisme ini lah yang memperlihatkan dominasi partai politik dalam perpolitikan di Indonesia, bukan hanya menempatkan pemilu sebagai penghubung antara kepentingan rakyat dan pemerintah, namun lebih sebagai ajang perebutan kekuasaan antar partai politik dengan memanfaatkan preferensi politik masyarakat. Dengan kata lain, demokrasi dalam hal ini tidak benar-benar menjadi representasi dari mekanisme politik yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, namun lebih cenderung sebagai sistem politik yang memanfaatkan suara mayoritas pemilih untuk melegitimasi kekuasaan para elite.

Sejarah perpolitikan Indonesia juga memperlihatkan bahwa popularitas tokoh adalah senjata paling ampuh untuk partai politik mampu merebut kekuasaan atau melanggengkan kekuasaannya. Pada pemilihan presiden secara langsung pertama kali pasca reformasi, yaitu di tahun 2004, banyak yang tidak menyangka bahwa terdapat partai baru yang secara singkat memperoleh simpati dari masyarakat berdasar pada popularitas kandidat presiden yang diusungnya. Partai Demokrat waktu itu adalah partai baru yang mengusung Susilo Bambang Yudhoyono sebagai calon presiden berbekal tingkat popularitasnya di masyarakat. Menurut Jun Honna (2012), popularitas Susilo Bambang Yudhoyono tidak terlepas dari harapan keamanan, citra reformis yang dibangun, serta penampilan Susilo Bambang Yudhoyono yang cukup menarik bagi pemirsa televisi waktu itu. Konteks nasional di masa reformasi tersebut tidak lah jauh dari konflik sosial yang berturut-turut terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Harapan masyarakat terhadap pemimpin berbasis militer, yang sedikit lebih humanis dibanding Orde Baru, mampu mengatasi berbagai problem sosial-

politik di masa itu. Momentum dan konteks sosial politik ini lah yang kemudian menjadi dasar dari peningkatan simpati masyarakat terhadap Susilo Bambang Yudhoyono sebagai calon presiden, bahkan hingga dua periode kepemimpinan.

Popularitas Susilo Bambang Yudhoyono yang telah mampu membawa Partai Demokrat sebagai salah satu partai besar di Indonesia saat ini ternyata juga ikut mendorong dirinya dalam posisi sentral dari partai tersebut. Dirinya dikukuhkan sebagai ketua umum Partai Demokrat pada tahun 2013, dan menjabat hingga tahun 2020. Kedudukannya sebagai ketua umum ini lah yang kemudian mengkonstruksi dirinya sebagai patron dari Partai Demokrat. Hal ini dikuatkan dengan mandat politik yang diteruskan oleh anak sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono, sebagai ketua umum Partai Demokrat sejak tahun 2020 hingga saat ini. Perjalanan politik dari Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat, dari kemunculannya hingga masa kekuasaannya, memperlihatkan popularitas adalah salah satu kunci dalam memenangkan kontestasi politik pada alam demokrasi di Indonesia. Penentuan suara masyarakat didorong oleh preferensi politik yang tidak terlepas dari kesesuaian antara selera dan konteks sosial politik yang terjadi dengan citra yang berusaha dihadapkan oleh tokoh atau partai politik tertentu kepada publik. Meski berujung pada personalisasi politik yang bersifat elitis, namun kemunculan Partai Demokrat di tahun 2004 sebagai partai baru yang berhasil meraup kemenangan politik tersebut memperlihatkan masih adanya peluang demokrastisasi di tengah perebutan kekuasaan para elite politik.

Seiring dengan keberadaan para figur yang memiliki peran sebagai patron dari beragam partai politik, mengembalikan partai politik di Indonesia jauh dari harapan sebagai organisasi modern, beragam partai politik dikelola secara tradisional dengan tersentral pada figur kharismatik (Calise, 2015; Nurhasim, 2013). Selain personalisasi politik yang terjadi pada Partai Demokrat. Proses personalisasi politik dapat ditemukan dalam kepemimpinan beragam partai besar yang lainnya. Seperti halnya yang terjadi pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partai tersebut menempatkan mantan presiden ke-lima Indonesia, Megawati Soekarno Putri, sebagai tokoh sentral. Megawati Soekarno Putri

sebagai trah Soekarno dianggap dapat memperjuangkan dan meneruskan ideologi dari sang proklamator (Mustafa, 2011). Hal ini terjadi juga pada beberapa partai lainnya, seperti saat menyebut partai Gerindra yang akan identik dengan figur Prabowo Subianto, juga melekatnya nama Surya Paloh pada Partai Nasionalis Demokrat. Dengan kata lain, personalisasi politik ini akan mempengaruhi arah politik dari tiap partai tersebut yang melekat pada kepentingan dan keputusan dari figur patron pada masing-masing partai. Termasuk dalam melakukan estafet kepemimpinan yang tidak lain adalah upaya meneruskan *legacy* politiknya kepada keturunan dan kerabat disekitarnya para patron tersebut, dalam hal ini lah sistem multi-partai kemudian mengarah pada terbentuknya politik multi-dinasti di Indonesia.

4. Media Sosial dan Kuasa Hegemoninya di Ranah Sosial-Politik

Media sosial dapat dikatakan merupakan sarana bagi manusia untuk melakukan berbagai bentuk interaksi sosial dalam segala tujuan. Media sosial ini sangat lah beragam dari media cetak (koran, tabloit, majalah, dan sebagainya) hungga media elektronik. Sejalan dengan perkembangan peradaban manusia, media sosial pun ikut mengalami perkembangannya. Perkembangan media sosial disokong oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin mempermudah manusia dalam melakukan interaksi dengan manusia yang lainnya. Keberadaan teknologi digital, dengan penggunaan berbagai algoritma dan sistem digital, menjadi faktor utama melesatnya perkembangan media sosial hingga memperoleh posisi utama dalam kehidupan manusia. Hal tersebut menjawab tuntutan kebutuhan manusia yang semakin tinggi dalam melakukan interaksi sosial. Penggunaan media sosial pun seakan menjadi tanpa batas, bermunculan berbagai *platform* media sosial yang menawarkan beragam bentuk kemudahan komunikasi serta penyebaran informasi yang tidak lagi berjalan satu arah dengan didukung berbagai fitur yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan. Hal tersebut yang kemudian mendorong semakin tingginya kegandrungan masyarakat terhadap penggunaan beragam bentuk *platform* media sosial digital.

Di Indonesia, jumlah pengguna media sosial digital aktif dapat dikatakan sangatlah besar. Bahkan menurut data yang dipaparkan Damandsage (2023) jumlah pengguna media sosial digital di Indonesia mencapai 217, 53 pengguna pada tahun 2023, yaitu hampir 80% dari hasil proyeksi keseluruhan jumlah penduduk Indonesia oleh Badan Pusat Statistik tahun 2023, yaitu 278,8 juta jiwa.

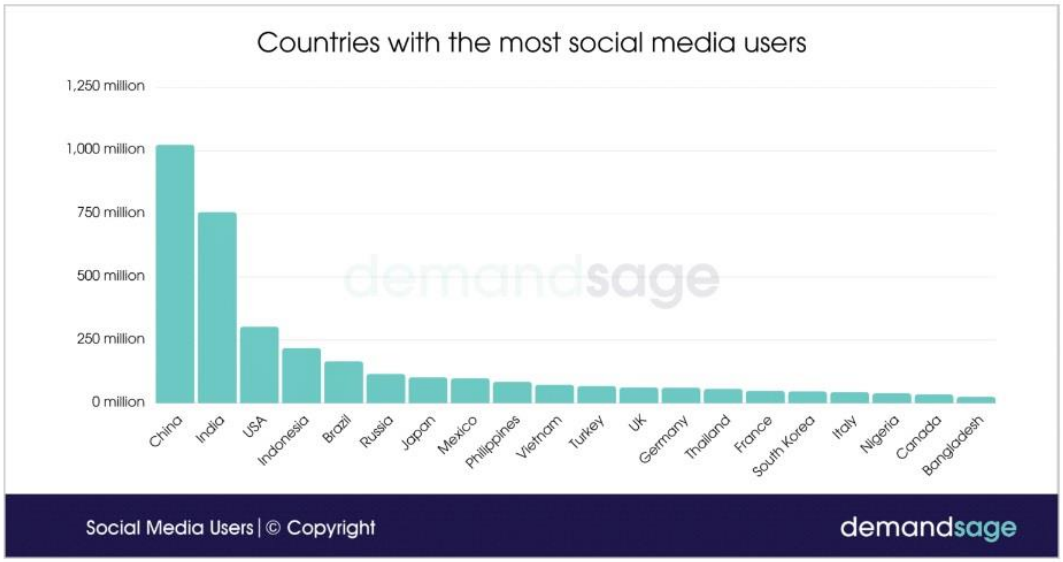

Gambar 4.
Negara dengan jumlah poengguna media sosial terbesar di dunia
(Sumber: damandsage.com)

Country	Users In 2023	Predicted number of users by 2027
China	1,021.96 million	1,212.38 million
India	755.47 million	1,177.5 million
USA	302.25 million	327.22 million
Indonesia	217.53 million	261.7 million
Brazil	165.45 million	188.35 million
Russia	115.05 million	126.37 million
Japan	101.98 million	113.03 million
Mexico	98.21 million	122.07 million
Philippines	84.07 million	92.68 million

Gambar 2.
Jumlah pengguna media sosial digital tahun 2023 dan prediksi tahun 2027 di tiap negara
(Sumber: damandsage.com)

Data tersebut dapat memperlihatkan begitu besarnya antusiasme masyarakat Indonesia dalam penggunaan media sosial digital. Bahkan penggunaan media sosial digital seakan menjadi suatu syarat wajib dalam berkehidupan sosial di tengah masyarakat Indonesia.

Tidak dapat dibantahkan lagi bahwa media sosial digital, dalam dua dekade belakang ini, menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kehidupan sosial di seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Hal tersebut bahkan mempengaruhi perubahan paradigma masyarakat sebagai *digital native* yang menjalankan sebagian besar aktivitasnya melalui media digital yang tak terbatas oleh ruang dan waktu (Helpster& Enyon, 2010: 1). Media sosial digital selain diposisikan sebagai sarana komunikasi dan informasi, saat ini juga dianggap sebagai kebutuhan bagi masyarakat. Melalui media sosial digital, manusia memperoleh pemuasan terhadap kebutuhan eksistensialnya, yang salah satunya untuk memperoleh apresiasi dari individu yang lainnya melalui sistem tanda yang diperoleh dari beragam *platform* digital. Menurut Baudrillard (1970: 30), media sosial membawa pada proses manipulasi tanda dengan menyamakan yang nyata dengan berbagai tanda yang disuguhkan. Dalam hal ini lah interaksi sosial dalam kehidupan manusia direduksi ke dalam sistem tanda yang terdapat pada media sosial digital dan memberi ilusi kepuasan untuk kebutuhan eksistensial setiap individu.

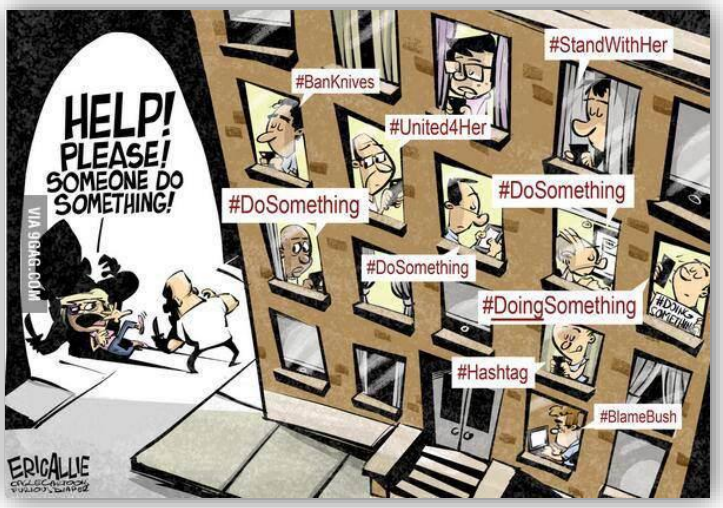

Gambar 5.
Ilustrasi dari penggunaan *tagar* dalam media sosial yang menggantikan tindakan nyata
(Sumber: 9gag.com)

Penggunaan media sosial mendorong kemudahan untuk setiap orang dapat dengan mudahnya mengunggah berbagai informasi dari yang bersifat umum hingga hal-hal yang bersifat pribadi ke ranah publik demi apresiasi dari pengguna lainnya. Dapat dikatakan kondisi ini telah membaurkan antara ruang *private* yang seharusnya adalah ruang pribadi setiap orang dengan ruang publik yang merupakan wilayah terbuka untuk siapa pun. Kondisi tersebut menempatkan proses penyebaran informasi tidak hanya sebagai bagian dari transmisi pengetahuan, namun lebih kepada proses mendulang apresiasi baik yang bersifat materiil maupun non materiil. Menurut Baurillard (dalam Wikandaru, 2017), penggunaan media sosial digital memposisikan informasi sebagai suatu komoditas yang dikonsumsi oleh masyarakat, dengan kata lain produksi informasi menjadi peluang yang menghasilkan keuntungan demi kepentingan-kepentingan tertentu.

Kegandrungan dan kebutuhan masyarakat terhadap informasi ini lah yang kemudian menarik berbagai pihak untuk mendulang keuntungan baik dalam hal ekonomi hingga ke perkara politik. Seperti apa yang disampaikan oleh Baudrillad (dalam Haryatmoko, 2016: 80). informasi adalah suatu bentuk representasi dari realitas, yang dalam proses ini menghasilkan beragam simulasi yang disodorkan kepada masyarakat sebagai suatu kebenaran Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, tanda menjadi suatu acuan dalam kehidupan sosial manusia. Media sosial digital digunakan sebagai sarana persuasi untuk mengajak masyarakat menerima berbagai tanda tersebut sebagai simulasi, baik yang berupa produk, simbol, maupun infomrasi itu sendiri sebagai representasi cara pandang terhadap berbagai aspek kehidupan. Hal tersebut salah satunya terjadi dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Perkembangan politik di Indonesia saat ini dapat memperlihatkan bahwa media sosial digital ikut memiliki andil sebagai sarana mempengaruhi preferensi politik masyarakat Indonesia. Para elite yang terafiliasi dengan beragam partai politik berbondong-bondong menguasai media sosial demi memperebutkan kekuasaan ataupun mempertahankan kekuasaannya. Menurut Reno Wikandaru

(2017) media sosial tersebut digunakan sebagai sarana memproduksi informasi, dimana informasi tersebut diarahkan sebagai bentuk representasi dari realitas tertentu yang disodorkan kepada masyarakat.

Perkembangan demokrasi pasca reformasi yang mendorong kebebasan pers dengan didukung Undang Undang nomor 40 tahun 1999 ikut memberi keleluasaan setiap pihak memproduksi beragam informasi demi berbagai kepentingan, termasuk dalam kepentingan politik. Beragam media sosial digital yang dikuasai oleh para elite politik tersebut kemudian digunakan sebagai upaya memproduksi informasi, baik yang mengarah kepada upaya mendukung maupun menjatuhkan pihak tertentu. Hal ini juga terlihat dari pemahaman terhadap konsep demokrasi itu sendiri, dimana citra dimokrastis dan non demokrastis direpresentasikan kepada pihak-pihak tertentu demi kepentingan politik praktis. Menurut Nadeak (2015), politik praktis merupakan upaya yang dilakukan demi merebut atau mempertahankan kekuasaan bagi diri sendiri maupun golongan tertentu. Di negara yang berbasis pada sistem demokrasi seperti Indonesia, upaya tersebut sering ditemukan dalam setiap kontestasi politik. Citra demokratis dibangun dengan berlatar berbagai tindakan dan ungkapan yang merepresentasikan keberpihakan elite atau partai politik tertentu terhadap kepentingan rakyat. Namun, di lain sisi, pembangunan citra di media sosial sering kali juga menjadi tanda yang digunakan untuk merepresentasikan kedekatan terhadap golongan baik yang berlatar agama, suku, serta ras secara eksklusif. Praktik politik yang berlandas pada identitas ini menjadi alat untuk mempengaruhi dukungan masyarakat dari beragam kalangan. Hal tersebut secara tidak langsung mendistorsi penilaian objektif masyarakat terhadap tiap elite politik beralih kepada sentimen golongan, baik yang berbasis agama maupun kesukuan. Kondisi ini lah yang memperlihatkan bahwa penggunaan media sosial dalam membangun berbagai citra sebagai tanda dalam kepentingan perpolitikan di Indonesia dapat berujung pada polarisasi sosial.

Polarisasi sosial tersebut dapat dikatakan menjadi salah satu dampak negatif dari penerapan prinsip demokrasi dan pembangunan citra demokratis

dalam media sosial. Dimana citra politik yang menjadi tanda seseorang maupun kelompok mampu berlaku secara demokratis, berorientasi kepada kepentingan rakyat, akan selalu menjebak kepada eksklusifitas terhadap pihak-pihak tertentu, khususnya pihak dari golongan mayoritas. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Alain Badiou (dalam Suryajaya, 2021: 40) yang menyatakan bahwa demokrasi, suatu sistem dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat, akan mengarahkan pada suatu representasi kepentingan rakyat melalui suara rakyat tersebut. Dalam hal ini suara rakyat adalah tanda yang berupaya diposisikan sebagai representasi dari presentasi kepentingan seluruh rakyat. Tetapi pada realitanya pandangan tentang suara rakyat ini tidak dapat benar-benar mewakili kepentingan keseluruhan rakyat, karena akan selalu ada yang disebut sebagai *excess,* atau sisa dari kesatuan himpunan suara rakyat yang berasal dari representasi terhadap keseluruhan kepentingan rakyat. Dalam hal ini lah presentasi murni dari keseluruh masyarakat tidak akan pernah benar-benar teraktualisasikan, karena kepentingan rakyat selalu berada dalam posisi terwakilkan dalam suatu negara yang berbasis demokrasi.

Hubungan antara rakyat dengan negara demokratis ini dapat dilihat dalam skema pemikiran Badiou (2005: 99) sebagai tiga kategori, yaitu normal, singular, dan khusus. Kategori normal merupakan kondisi kealamiahan atau presentasi yang murni, masyarakat yang terpresentasi sekaligus terrepresentasikan, hal ini saat kepentingan masyarakat dapat nampak seperti apa adanya tanpa harus terdefinisikan sebagai suara rakyat. Kategori singular, masyarakat yang terpresentasi namun tidak terpresentasikan dalam penerapan dan pemahaman konsep demokrasi. Bagian ini adalah masyarakat yang bukan dikatakan sebagai bagian karena luput dari perhitungan. Kategori khusus (*excresence*) yang merujuk suatu hal yang terrepresentasikan tanpa terpresentasikan. Hal tersebut seperti halnya konsep demokrasi yang berbasis pada suara rakyat yang digunakan sebagai tanda dalam penggunaan media sosial digital namun tak menampakan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Skema pemikiran Badiou ini memperjelas bagaimana kerancuan terhadap pemahaman konsep demokrasi dan penerapannya dapat terjadi dengan

senantiasa mengacu kepada yang khusus, dan mengeliminir yang singular, menerima yang struktur namun menolak yang metastruktur.

Kerancuan baik dalam penerapan prinsip demokrasi maupun pemahaman konsep demokrasi tersebut secara khusus nampak dalam penggunaan media sosial digital pada dunia perpolitikan di Indonesia. Kebebasan bersuara dan berpendapat melalui media sosial digital, dapat dikatakan tidak secara serta merta mampu membawa kepada suatu wujud presentasi murni dari demokrasi yang berkeadilan dan berbasis kepada kesetaraan. Citra demokratis yang dibangun dan disebarluaskan melalui media sosial digital diklaim sebagai tanda yang teridentifikasikan kepada pihak tertentu dalam suatu kontestasi politik, nyatanya tidak akan pernah dapat mengarah kepada kesetaraan. Hal ini dikarenakan setiap kontestasi politik pasti berujung pada penempatan satu pihak dalam posisi menang dan pihak yang lainnya pada posisi kalah. Setiap pihak, baik dari masing-masing elite maupun partai politik tertentu, yang berusaha mengklaim dirinya identik dengan penerapan prinsip demokrasi, pengutamaan pada kepentingan rakyat, akan tergiring kepada yang khusus dengan berupaya memonopoli konsep demokrasi tersebut hingga memposisikan pihak yang lainnya non demokratis atau kurang demokratis. Hal ini seakan memasung konsep demokrasi pada definisi tunggal yang berlandas pada subjektivitas tertentu. Dapat dikatakan bahwa upaya memonopoli citra demokratis sebagai suatu representasi dari realitas kepentingan rakyat tersebut, pada dasarnya adalah salah satu wujud tindakan non demokratis di tengah penerapan demokrasi dalam negara yang berbasis pada prinsip demokrasi.

Kajian ini menggunakan metode hermeneutika historis dengan berlandas pada kesinambungan historis dari perkembangan demokrasi pasca reformasi hingga era digital di Indonesia. Demokrasi pada dasarnya adalah suatu konsep politik yang sering digaungkan dalam setiap kepemimpinan politik di Indonesia, bahkan pada masa kepemimpinan rezim Orde Lama dan Orde Baru. Namun demokrasi pada masa tersebut belum bernafas secara lega karena terkungkung oleh upaya pengukuhkan kekuasaan dari tiap rezim, sampai dengan terjadinya

reformasi politik pasca runtuhnya kepemimpinan rezim Orde Baru dengan ditandai pengunduran diri dari Presiden Soeharto. Dalam hal ini lah terjadi suatu pergeseran bentuk kekuasaan, dari yang tersentral pada kekuasaan militer mengarah kepada desentralisasi yang dipegang oleh sipil. Reformasi membuka harapan dari masyarakat untuk teraktualisasinya demokrasi secara sempurna di Indonesia. Tetapi, demokrasi pada masa reformasi sebagai hasil desentralisasi politik nyatanya juga membawa kepada disorientasi kebangsaan dengan berujung pada beragam konflik sosial yang berlandas etnis dan agama di berbagai wilayah di Indonesia.

Sistem multi-partai yang menjadi salah satu hasil dari reformasi politik di Indonesia, membuka celah untuk setiap individu dan kelompok dapat berpartisipasi dengan melakukan perserikatan politik untuk menyuarakan suara masing-masing pihak. Kebebasan dalam berserikat melalui partai politik tersebut memberi kebebasan setiap partai menentukan mekanisme dan ideologi dari masing-masing partai. Semangat kebebasan tersebut ternyata terbentur dengan relasi kuasa yang terbangun dalam internal tiap partai. Kultur patronase yang menjangkiti kepemimpinan partai politik di Indonesia merujuk pada kekuasaan figur politik tertentu yang bersifat sentralistik. Patron tersebut berasal dari figur karismatik yang diagungkan karena memiliki popularitas atau menduduki jabatan tinggi nasional yang dianggap menentukan eksistensi masing-masing partai politik. Proses personalisasi politik ini lah yang kemudian melekatkan arah politik dari setiap partai kepada kepentingan dan keputusan dari tiap patron politik tersebut. Hal ini termasuk dalam upaya melakukan estafet kepemimpinan, dimana keturunan dan kerabat dari tiap patron politik dianggap akan mampu meneruskan *legacy* politik masing-masing partai politik. Pada kondisi ini lah penerapan sistem muti-partai mengarah kepada penerapan politik multi-dinasti di Indonesia.

Perjalanan penerapan prinsip demokrasi di Indonesia mengalami perkembangan dengan disokong oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Media sosial digital yang digandrungi oleh masyarakat Indonesia membuka peluang untuk setiap individu mampu bersuara dan berpendapat

tanpa batas dalam ruang-ruang digital. Keterbukaan arus komunikasi dan informasi ini, memposisikan informasi sebagai suatu komoditas yang dapat berpotensi menghasilkan keuntungan baik materiil ataupun non materiil. Dimana dalam pandangan Baudrillard, informasi ini adalah suatu tanda yang berasal dari representasi realitas yang ada, dengan kata lain bahwa hal ini membuka celah terjadinya manipulasi tanda yang disebut sebagai simulasi. Pentingnya informasi dalam masyarakat digital ini lah yg kemudian ikut mempengaruhi gerak demokrasi di Indonesia. Pada setiap kontestasi politik, citra demokrasi diketengahkan sebagai representasi dari sosok yang berpihak kepada suara rakyat. Namun secara praktis, hal ini menjadi wujud manipulasi tanda, yang menempatkan pihak lain non demokratis atau kurang demokratis. Selain itu suara rakyat juga adalah representasi dari perwakilan kepentingan rakyat, dimana menurut Badiou hal ini akan menjebak pada yang khusus, dan menghasilkan *excess* yang merupakan kepentingan dari pihak-pihak yang tak terwakilkan. Dengan kata lain, demokrasi sebagai suatu tanda dalam penggunaan media sosial digital mengalami kerancuan secara konsep dan penerapan. Dalam realitas sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia ini lah, demokrasi tidak dapat didudukan sebagai produk politik yang bersifat final, namun harus diposisikan sebagai suatu proses yang senantiasa bergulir untuk mencapai kedaulatan dari rakyat, bukan hanya ditataran konsep namun juga dalam penerapannya.

Daftar Pustaka

Apter, David. (1990). *The Politics of Modernization.* Chicago: University of Chicago Press

Badiou, Alain. (2005). Being and event. (diterj: Oliver Feltham). New York: Continuum

Baudrillard, Jean. (1970). *La société de Consommation*. Paris: Denöel.

Blondel, Jean., Jean-Louis Thiebault, eds. (2010). *The Profession of Government Minister in Western Europe.* London: Macmillan

Calise, M. (2015). The Personal Party: An Analytical Framework. *Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica*, *45*(3), 301-315.

Cross, W. P., & Katz, R. S. (Eds.). (2013). *The Challenges of Intra-party Democracy*. OUP Oxford.

Davidson, J. S. (2022). *Demokrasi Indonesia Pasca-Orba: Antara Inovasi, Stagnasi, dan Polarisasi.* (WP Utomo, Penerj.) Yogyakarta: Insistpress.

Gultom, B. (2013). *Pelanggaran HAM Dalam Hukum Keadaan Darurat di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Harahap, Y. (2020). Demo (n) s dan Kratos: Kritik Terhadap Praktik Demokrasi dari Kacamata Kekristenan. *KENOSIS: Jurnal Kajian Teologi*, *6*(2), 199-215.

Haryatmoko, (2016). *Membongkar Rezim Kepastian, Pemikiran Kritis Post-Strukturalis*. Yogyakarta: Kanisius.

Helsper, E. & Eynon, R. (2010) Digital natives – Where is the evidence? *British Educational Research Journal*, 36 (3).

Honna, J. (2012). Inside the Democrat Party: power, politics and conflict in Indonesia's Presidential Party. *South East Asia Research*, *20*(4), 473-489.

Hutabarat, D. T. H., Sari, S. N., Kamil, T., Ramadhan, W. S., Ambarwati, E. A., Alfathni, T. N.,. & Pangestu, I. (2021). Makna Demokrasi Pancasila. *Journal Of Humanities, Social Sciences And Business*, *1*(1), 59-64.

Indrawan, J. (2015). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Konflik di Timor Timur sebelum Kemerdekaannya dari Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, *11*(2).

Labolo, M., & Ilham, T. (2015). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Liling, M. T. (2021). Kajian Yuridis Penyederhanaan Partai Politik Menuju Sistem Multipartai Sederhana Guna Memperkuat Stabilitas Dan Efektivitas Implementasi Kebijakan Pemerintah Indonesia. *LEX ADMINISTRATUM*, *9*(7).

Nadeak, L. (2015). KLERIKUS DILARANG BERPOLITIK PRAKTIS: Promosi Agar Klerikus Aktif Berpolitik Kepedulian Sosial. *Logos*, *12*(2), 90-101.

Noventari, W. (2016). Kuasa Dibalik Senyum Sang Jendral (Analisis Gaya Kepemimpinan Dan Bagaimana Soeharto Melanggengkan Kekuasaan Selama 32 Tahun). *VIDYA jurnal Universitas Wisnuwardhana*, *24*(2), 34-40.